



PERANAN DINAS PERTANIAN DALAM ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI KAWASAN INDUSTRI DI KABUPATEN KARAWANG

Amelia Ningsih, Lukmanul Hakim, Lina Ariyani

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia.

Abstrak

Fenomena alih fungsi lahan memang sulit dihindari dan dianggap sebagai konsekuensi untuk daerah yang sedang berkembang, seperti halnya di Kabupaten Karawang. Pertumbuhan laju penduduk yang meningkat menyebabkan kebutuhan infrastruktur seperti perumahan, jalan, kawasan industri, gedung perkantoran, dan gedung gedung lainnya juga meningkat. Oleh sebab itu, dibutuhkannya peran pemerintah setempat dan Dinas Pertanian sebagai usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil pertanian walaupun adanya pengalihan fungsi lahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Karawang dalam menghadapi fenomena alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Karawang perannya dibuktikan dengan beberapa solusi yang diberikan bersama dengan pemerintah setempat yaitu melalui program Intensifikasi Pertanian, Ekstensifikasi Pertanian, Diversifikasi Pertanian, Mekanisme Pertanian, dan Rehabilitasi Pertanian. Selain itu, ada juga program asuransi lahan pertanian yang disubsidikan oleh pemerintah pusat dan subsidi daerah melalui APBD Kabupaten untuk para petani agar mereka tidak merasa khawatir apabila ada masalah gagal panen ataupun terkena serangan hama dan lain sebagainya. Program tersebut dilakukan agar jumlah petani di daerah tersebut apalagi Kabupaten Karawang yang terkenal dengan daerah Lumbang Padinya tidak mengalami penurunan.

Kata Kunci: Alih Fungsi Lahan Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Peranan Kebijakan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris, hal tersebut dibuktikan dengan mayoritas penduduknya yang memiliki mata pencaharian utama sebagai petani. Bahkan pada masa penjajahan menceritakan bahwa Belanda dan Portugis begitu tergila-gila serta sangat mempunyai tekad untuk menguasai Indonesia. Berbagai cara dilakukan bahkan rela mati berperang demi menguasai nusantara. Hal tersebut terjadi karena tanah dan lahan pertanian Indonesia sangat subur dan melimpah membentang sepanjang nusantara. Namun apakah sekarang Indonesia masih pantas disebut dengan negara agraris?

Akhir-akhir ini, sektor pertanian memiliki permasalahan dan hambatan yang cukup banyak. Permasalahan tersebut diantaranya yaitu semakin sempitnya ketersediaan lahan untuk kegiatan pertanian yang disebabkan oleh kebijakan alih fungsi lahan perubahan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Salah satu contoh permasalahan tersebut terjadi di Kabupaten Karawang, lahan pertanian di Kabupaten Karawang jumlahnya terus menyusut karena terdapat alih fungsi lahan tersebut yang umumnya terjadi di wilayah perkotaan.

Perubahan alih fungsi lahan pertanian merupakan suatu proses pemanfaatan lahan pertanian dari penggunaan hortikultura ke penggunaan lainnya. Hal tersebut biasanya dilakukan karena beberapa faktor salah satunya yaitu perkembangan penduduk yang memicu semakin luasnya kebutuhan lahan, baik itu untuk pemukiman, industri maupun fasilitas lainnya. Perubahan alih fungsi lahan merupakan penyesuaian sebagian atau keseluruhan kawasan dari fungsi yang awal menjadi fungsi yang lain. Perubahan tersebut memiliki dampak terhadap iklim dan potensi lahan tersebut. (Nurelawati & dkk, 2018)

Sedangkan Menurut (Mustofa, 2011) Alih fungsi lahan pertanian adalah sektor pertanian yang berubah alih atau fungsi ke sektor non-pertanian. Secara keseluruhan, lahan yang awalnya digunakan untuk kegiatan pertanian berubah fungsinya menjadi kegiatan lainnya diluar pertanian, seperti kegiatan pembangunan permukiman, kawasan industri ataupun infrastruktur lainnya.

Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karawang ia menyatakan bahwa ada area sawah yang secara tata ruang sudah ditetapkan untuk perkembangan kota. Sawah-sawah itu yang kemudian beralih fungsi. Lahan-lahan untuk pengembangan kota tersebut disiapkan hingga 20 tahun kedepan, sesuai dengan jangka waktu RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), namun meski untuk kepentingan pengembangan kawasan perkotaan, sawah yang berjarak 200 meter dari tepi jalan utama tidak boleh di alih fungsikan.

Alih fungsi lahan memang sulit dihindari dan dianggap sebagai konsekuensi untuk daerah yang sedang berkembang, seperti halnya di Kabupaten Karawang. Pertumbuhan laju penduduk yang meningkat menyebabkan kebutuhan infrastruktur seperti industri, jasa, permukiman, dan berbagai fasilitas gedung lainnya seperti perkantoran, rumah sakit, sekolah, dan lainnya juga mengalami peningkatan. Berikut dibawah ini merupakan pertumbuhan laju penduduk di Kabupaten Karawang.

Tabel. 1 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Karawang 2019

Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
Pangkalan	38.408	0,52
Tegalwaru	37.626	1,42
Ciampel	44.104	2,71
Telukjambe Timur	135.914	2,06
Telukjambe Barat	54.957	0,66
Klari	181.111	2,56
Cikampek	115.369	1,33
Purwasari	75.934	3,62
Tirtamulya	49.599	0,48
Jatisari	78.5636	0,39
Banyusari	55.425	-0,67
Kotabaru	131.136	2,38
Cilamaya Wetan	78.279	0,94
Cilamaya Kulon	64.566	1,13
Lemahabang	64.711	0,13
Telagasari	68.183	1,47
Majalaya	64.557	4,28
Karawang Timur	146.326	2,26
Karawang Barat	161.554	0,67
Rawamerta	53.608	-1,00
Tempuran	64.976	0,04
Kutawaluya	59.086	1,84
Rengasdengklok	109.718	1,55
Jayakarta	65.557	3,34
Pedes	78.187	2,52
Cilebar	43.494	0,01
Cibuaya	52.050	1,97
Tirtajaya	70.166	2,99
Batujaya	77.966	1,85
Pakisjaya	39.887	2,15
TOTAL	2.361.019	1.60%

Sumber : BPS Kab-Karawang, 2019

Lahan pertanian sangat bermanfaat baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan setempat. Oleh karena itu, dengan adanya alih fungsi lahan tersebut menyebabkan dampak negatif terutama untuk masyarakat yang berprofesi sebagai petani, yakni adanya ketergantungan yang cukup tinggi oleh petani terhadap lahan pertanian tersebut. Maka apabila lahan pertanian berkurang, otomatis berkurang pula produksi dan

penghasilan yang didapat oleh seorang buruh tani. Selain itu, dampak yang dirasakan juga terjadi didalam masalah kependudukan.

Meningkatnya alih fungsi lahan tersebut menjadi kawasan industri menyebabkan banyaknya penduduk baru yang berdatangan untuk mencari pekerjaan. Hal tersebut menimbulkan ledakan jumlah penduduk didaerah tersebut. Jumlah penduduk yang semakin besar mengakibatkan kepadatan penduduk yang berpengaruh pada sanitasi lingkungan, pemukiman kumuh, dan banyaknya kejahatan kriminalitas dan lain sebagainya. Berikut dibawah ini merupakan tabel yang menyajikan beberapa daftar kawasan industri yang terdapat di daerah Kabupaten Karawang yang peneliti dapatkan melalui data di website Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Tabel.2 Kawasan Industri di Kabupaten Karawang

No	Nama Kawasan	Luas (Ha)
1	Kawasan Industri Indotaisei (Kota Bukit Indah)	694,20
2	Kawasan Industri Kujang Cikampek	110,00
3	Kawasan Industri Mitrakarawang	500,00
4	Kawasan International Industrial City (KIIC)	1,347,00
5	Suryacipta IE	1.400,00
6	Mandalapratama Permai Industrial Estate	237,50
7	Podomoro Industrial Park	542,00
8	Kawasan Industri Artha Industrial Hill	390,00
9	Kawasan Industri GT Tech Park	400,00

10	Karawang New Industrial City	205,00
11	Kawasan Industri Pertiwi Lestari	791,28
12	Karawang Jabar Industrial Estate	400,00

Sumber : Kementerian Perindustrian RI, 2016

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri, kawasan industri adalah kawasan modern yang dipusatkan untuk kegiatan industri dengan dilengkapi dan ditunjang oleh sarana dan prasarana. Suatu kawasan yang dapat disebut sebagai Kawasan Industri harus memenuhi dua syarat mendasar, yakni : Sarana dan prasarana yang lengkap dan menunjang untuk kawasan industri, dan terdapat lembaga atau badan manajemen yang memiliki izin usaha dalam pengelolaan kawasan industri tersebut. (Sipayung & Susanty, 2014)

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Karawang, masih terdapat banyaknya kawasan pertanian yang nantinya akan beralih status atau mengalami perubahan fungsi beberapa tahun kedepan. Hal tersebut dikarenakan akan adanya penyesuaian daya tampung lahan pertanian dibagian selatan jalan lingkaran luar karawang yang di mulai dari Desa Tanjungpura hingga ke bagian barat yakni Desa Warungbambu yang luasnya mencapai 1.200 Ha. (Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Karawang).

Berdasarkan dengan data dari Dinas Pertanian setempat beberapa waktu lalu, laju alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian di Kabupaten Karawang mencapai 180 hektare tiap tahunnya. Apabila fenomena tersebut terus terjadi bahkan terus mengalami peningkatan, maka tidak menutup kemungkinan dapat menjadi ancaman bukan hanya untuk petani dan

lingkungan saja, tetapi hal tersebut juga dapat menjadi masalah besar bersifat nasional yang menimpa ketahanan pangan daerah setempat.

Gambar.1 Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian Karawang



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, 2019

Gambar.1 menunjukkan telah terjadinya penyesuaian kuantitas dari lahan pertanian di Kabupaten Karawang. Perubahan lahan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu seluas 643 hektar, dimana lahan pertanian yang tergenang lebih banyak mengalami transformasi atau perubahan fungsi. Berkurangnya luas areal persawahan menunjukkan bahwa adanya perbaikan pada kawasan non-pertanian yang dilakukan pada lahan sawah yang bermanfaat. Sebagian besar lahan yang diubah digunakan untuk tujuan perkembangan industri dan permukiman.

Tabel.3 Luas Lahan Pertanian Kabupaten Karawang 2015-2018

Jenis Lahan	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Lahan Sawah	96.48	95.90	95.53	95.28
Lahan Pertanian Bukan Sawah	39.40	38.15	33.42	30.80

Sumber : Proyeksi Penduduk Karawang, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan luas lahan pertanian di Kabupaten Karawang tiap tahunnya, baik itu lahan pertanian sawah maupun bukan sawah. Hal ini sebagai bukti bahwa lahan pertanian di

Kabupaten Karawang telah dialihfungsikan untuk kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana peran dari Dinas Pertanian Kabupaten Karawang dalam menghadapi fenomena tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus atau sering disebut juga sebagai bentuk penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan secara umum dari hasil data objektif yang didapatkan dari lapangan.

Metode pengumpulan informasi atau teknik pengumpulan data adalah bagian paling penting dalam penelitian, karena alasan utama penelitian adalah untuk mengumpulkan data sebagai informasi. (Sugiyono, 2012:224). Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Sumber informasi dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Data Primer, yakni sumber informasi yang diperoleh dari wawancara dan persepsi langsung dengan beberapa informan terkait mengenai Alih Fungsi Lahan Menjadi Kawasan Industri di Kabupaten Karawang serta peran yang dilakukan oleh Dinas Pertanian setempat.
- b) Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, studi kepustakaan, media internet atau berita publikasi yang berkaitan dengan topik dan permasalahan penelitian.

Untuk menganalisa penelitian ini, peneliti menggunakan Teori (Robbins & Judge, 2015:182) yang mendefinisikan peran sebagai sekumpulan contoh pada perilaku yang

diharapkan dapat dikomunikasikan kepada seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Sehingga dalam hal ini peneliti akan menganalisa apa saja peran yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Karawang selaku lembaga yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan ini. Sehingga penelitian ini dilakukan di Dinas Pertanian Kabupaten Karawang periode waktu yaitu pada tanggal 05 April 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Faktor Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Karawang

Adanya perubahan desain dan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih mendorong pada peningkatan sektor jasa serta industri menjadi salahsatu penyebab perubahan besar terhadap kebutuhan proses produksi seperti halnya kebutuhan tenaga kerja, modal dan lahan antar sektor. Pertumbuhan laju penduduk yang kerap mengalami kenaikan berdampak pada alih fungsi atau perubahan alokasi sumberdaya khususnya sumberdaya lahan.

Dengan demikian tidak menutup kemungkinan terjadinya redistribusi aset tanah antar wilayah, di mana redistribusi difokuskan pada pemanfaatan yang memiliki tingkat pengembalian yang paling tinggi, misalnya kebutuhan lahan yang dipergunakan untuk kegiatan industri sebagai tindakan mendasar yang dapat menarik peningkatan lainnya seperti pemukiman, perdagangan dan prasarana lainnya, sehingga hal tersebut terus berdampak dan menjadi faktor utama adanya kegiatan alih fungsi lahan yang tidak dapat dihentikan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan pertanian itu berbeda-beda. Selain dengan adanya faktor internal yakni faktor dari petani itu sendiri, terdapat juga faktor eksternal berasal dari tingkat wilayah yang mempengaruhi terjadinya

perubahan penggunaan lahan. Kabupaten Karawang yang menjadikan penataan ruangnya untuk pertanian dan industri sebagai tumpuan perekonomiannya perlu mensinergikan keduanya agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian. Akan tetapi, hal tersebut justru menjadi penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah. Alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Karawang dipengaruhi berbagai faktor. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi penurunan lahan sawah di Kabupaten Karawang adalah PDRB sektor industri, laju pertumbuhan jumlah penduduk, jumlah industri, dan proporsi luas lahan sawah terhadap luas wilayah.

2) Upaya Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

Penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian itu bersifat multidimensi. Dengan demikian, sulit untuk upaya pengendaliannya jika metode yang digunakan hanya satu saja, terlebih lahan pertanian ini memiliki nilai yang sangat banyak (multifungsi), maka harus ada perhitungan dengan aspek-aspek tertentu yang memang melekat pada eksistensi lahan tersebut dalam hal upaya pengendaliannya. Hal ini dikarenakan lahan yang tersedia memiliki nilai dan ciri yang berbeda, baik itu ditinjau dari beragam fungsi yang ditawarkan maupun dari segi jasa (*service*) yang dihasilkan. Dari hasil penelitian, peran kebijakan yang seharusnya dilakukan ditinjau dari beragam aspek adalah sebagai berikut :

1) Aspek Sosial

- Pembuatan dan pemberlakuan pembagian lahan sawah untuk sektor non-pertanian;
- Jaminan pasar oleh Perum Bulog, Penyuluhan pertanian, pendampingan

dan pengawalan kepada petani;

- Melakukan penyebaran informasi lahan pertanian yang berkelanjutan dan lahan pangan berkelanjutan serta melakukan pembentukan bank yang dikhususkan untuk para petani.

2) Aspek Ekonomi :

- Pemberian insentif atau kompensasi bagi para petani,
- Jaminan harga komoditas yang lebih baik dan melindungi petani,
- Penurunan penetapan retribusi tanah,
- Pembelian peralatan pertanian pascapanen dan jaminan akses pemodal, dan
- Penetapan kenaikan harga pembelian gabah dan beras ditingkat petani atau usaha penggilingan untuk pemerintah.

3) Aspek Lingkungan :

- Peningkatan luas areal pertanian yang dilakukan dengan cara memperluas kualitas dan kuantitas produksi, peningkatan kualitas benih, pemberantasan hama penyakit, dan pengembangan saluran irigasi.
- Ekstensifikasi lahan yaitu pemanfaatan lahan yang dilakukan dengan marginal, pemanfaatan lahan terlantar dan pemanfaatan lahan dibawah tegakkan tanaman keras.
- Perluasan lahan pertanian yang dilakukan dengan

menetapkan pengaturan desain tanam, sistem pertanian terpadu dan tumpang sari.

3) Peran dan Solusi Dinas Pertanian Kabupaten Karawang

Kabupaten Karawang yang dikenal sebagai daerah lumbung padi memiliki luas sawah teknis sebesar 96.000 hektar, kemudian pada tahun 1990 terbit Peraturan Presiden yang menyatakan bahwa karawang akan menjadi kota industri terluas di Asia Tenggara. Adapun lahan yang digunakan untuk kawasan industri bukan hanya lahan persawahan, tetapi juga lahan non produktif, sehingga nantinya juga ada lahan persawahan yang akan disiapkan untuk dijadikan lahan non persawahan namun tetap berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan oleh pengurus daerah tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang Bapak Ir. H. Hanafi terkait bagaimana peran Dinas Pertanian dengan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Karawang, dimana tentunya Pemerintah akan memberikan solusi serta peran berdasarkan program-program yang telah ditentukan dan berdasarkan dengan Peraturan Daerah setempat. Program tersebut merupakan usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil pertanian walaupun adanya pengalihan fungsi lahan tersebut. Program-program tersebut yaitu:

1. Intensifikasi Pertanian, yaitu program yang dibuat oleh pemerintah untuk tetap menjaga kekonsistenan produktivitas pertanian terutama padi dengan sarana dan cara yang beragam.
2. Ekstensifikasi Pertanian, yaitu program yang dibuat sebagai upaya peningkatan

hasil pertanian yakni melalui cara diperluasnya lahan pertanian yang baru dan membentuk persawahan pasang surut.

3. Diversifikasi Pertanian, yaitu program usaha untuk menganeekaragaman jenis usaha pertanian agar tidak ketergantungan pada salah satu hasil pertanian saja. Contohnya seperti kegiatan beternak ayam dan ikan.
4. Mekanisme Pertanian, yaitu program untuk upaya peningkatan hasil pertanian dengan digunakannya mesin atau alat modern dan canggih, dan mengutamakan tenaga manusia serta tidak lagi menggunakan tenaga hewan.
5. Rehabilitasi Pertanian, yaitu program sebagai upaya perbaikan lahan pertanian yang awalnya tidak begitu produktif menjadi sesuatu tanaman atau lahan yang lebih produktif dan memberi banyak keuntungan.

Selain itu, ada juga program asuransi lahan pertanian yang disubsidikan oleh pemerintah pusat dan subsidi daerah melalui APBD Kabupaten untuk para petani agar mereka tidak merasa khawatir apabila ada masalah gagal panen ataupun terkena serangan hama dan lain sebagainya. Program tersebut dilakukan agar jumlah petani di daerah tersebut apalagi Kabupaten Karawang yang terkenal dengan daerah Lumbung Padi tidak mengalami penurunan. Serta memberikan rasa nyaman dan senang terhadap para petani yang bekerja agar hasil produksi yang didapat juga meningkat.

Jadi, dapat dikatakan bahwa meskipun adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perindustrian, Kepala Dinas Pertanian

Kabupaten Karawang beserta dengan Pemerintah Daerah telah memberikan komitmen bahwa Karawang akan tetap terkenal dan dijuluki sebagai Daerah Lumbung Padi, dan alih fungsi lahan tersebut juga tidak serta merta untuk memenuhi kepentingan pribadi saja, namun untuk menjadikan Kabupaten Karawang menjadi daerah yang lebih maju dan berkembang.

SIMPULAN

Dari analisis yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fenomena alih fungsi lahan terjadi hampir setiap tahunnya di Kabupaten Karawang, terutama pada lahan persawahan. Pola alih fungsi lahan yang terjadi yaitu lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi daerah pemukiman, perkantoran serta sarana dan prasarana lain yang tidak dapat diubah kembali menjadilahan sawah. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan alih fungsi lahan pertanian di suatu wilayah yakni bertambahnya jumlah industri dan proporsi luas lahan sawah terhadap luas wilayah, selain itu juga para petani itu juga menjadi faktor terjadinya alih fungsi lahan dikarenakan proporsi pendapatan dengan biaya usaha tani sangat berketimpangan sehingga seringkali petani mengambil keputusan untuk menjual lahan persawahannya. Menanggapi hal tersebut, pemerintah telah menyediakan berbagai program yang dilaksanakan guna memajukan pertanian daerah. Dinas Pertanian yang memiliki tugas dan wewenang dalam menjaga kestabilan pangan serta produksi padi memiliki program unggulan sebagai langkah praktis di era modern ini seperti program investasi lahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan alih fungsi lahan tersebut tidak serta merta hanya untuk kepentingan pemerintah saja, melainkan untuk kepentingan masyarakat. Karena dengan adanya kawasan industri maka

pendapatan perkapita masyarakat akan meningkat dan daerah tersebut juga menjadi lebih maju dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Skripsi

Emilya, A. P. (2014). Analisis Ekonomi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Karawang Jawa Barat. Skripsi : Institut Pertanian Bogor.

Jurnal-jurnal

Mustofa, Z. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Demak. Jurnal Pertanian IPB.

Nurelawati, A., & dkk. (2018). Tren Alih Fungsi Lahan Sawah di Kabupaten Klaten. In Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian UNS, Vol.2.

Sipayung, D. L., & Susanty, A. (2014). PENILAIAN KESIAPAN KAWASAN INDUSTRI CANDI UNTUK MENJADI ECO-INDUSTRIAL PARK. Industrial Engineering Online Journal, Vol.3.

Buku-buku

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2015:182). Perilaku Organisasi. Alih Bahasa: Saraswati, R & Sirait, F. Jakarta: Salemba Empat.

Soekanto, S. (2012:212). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2012:224). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta CV.

Dokumen Resmi

Dinas Pertanian Kabupaten Karawang. (2019). Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Karawang

Internet

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Karawang 2019

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Kawasan Industri di Kabupaten Karawang

Proyeksi Penduduk Karawang 2020. Luas Lahan Pertanian Kabupaten Karawang 2015-2018.